

## KPK Bakal Gandeng Kemenhan Soal Pelatihan Bela Negara 24 Pegawai



**Realitarakyat.com** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggandeng Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk memberikan program pelatihan Bela Negara bagi 24 pegawai yang masih berpeluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian dikatakan Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Selasa (1/6/2021).

Diketahui, Sebanyak 24 orang tersebut merupakan bagian dari total 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi ASN. Keputusan KPK bersama sejumlah kementerian dan lembaga sebelumnya menyatakan 24 orang tersebut masih bisa bekerja di lembaga antirasuah tapi dengan syarat pembinaan terlebih dahulu.

Sedangkan sisa 51 pegawai lainnya dinyatakan tak bisa lagi bertugas di KPK. Adapun program Bela Negara kata Firli, merupakan bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan bagi 24 pegawai yang dianggap masih bisa dibina kendati tak lolos TWK.

"Yang diberikan kesempatan akan ikuti Bela Negara. Itu harus bekerja sama dengan pihak lain. Tak ada kita bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Diklat nanti kita bekerja sama. Tapi secara informal kita sudah bahas dengan Kemenhan," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (1/6).

Firli mengklaim lembaganya sudah bekerja dan mencari solusi terbaik bagi 24 pegawai KPK tersebut. Ia juga memastikan akan bertanya mengenai kesiapan 24 pegawai untuk mengikuti program Bela Negara.

"Nanti yang 24 kita ajak bicara, bersedia ikuti atau tidak? Yang jelas kita di sini satu kesatuan untuk cari solusi terbaik," tutur Firli.

Dalam proses alih status ini, Firli mengklaim tak ada upaya penyingkiran terhadap 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Kata dia, sama sekali tak ada perbedaan perlakuan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya.

Menurut Firli, seluruh pegawai diberikan instrumen, modul hingga, pertanyaan yang sama dalam proses TWK.

"Hasilnya yang memenuhi syarat 1.271. Yang tidak memenuhi 75. Semua dikatakan sesuai syarat dan mekanisme dan prosedur. Hasil akhir ada yang tak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Jadi gak ada upaya menyingkirkan siapa pun," kata Firli beralasan.

Dari total 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK, pimpinan lembaga antirasuah hingga kini belum membuka nama-nama mana yang masuk dalam daftar 51 pegawai berlabel 'merah' dan 24 pegawai yang masih bisa dibina. **[prs]**